

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanaman Modal Asing

1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Aing (PMA). Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang ini yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 UndangUndang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Pengertian modal asing dalam undang – undang tersebut (Jufrida, 2016), yaitu sebagai berikut:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang mendapat persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru dari orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang – undang ini keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing yaitu kegiatan arus modal yang didapatkan dari pihak luar yang bergerak ke bidang dari Investasi Asing. *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* mengartikan Penanaman Modal Asing seperti investasi yang dijalankan oleh perusahaan di dalam negara terhadap perusahaan di negara lain demi keperluan mengelola operasi perusahaan di negara tersebut (Arifin dkk, 2008 dalam Fadilah, 2017).

Menurut Ma'ruf dan Wihastuti (2008), teori pertumbuhan *endogen* menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak (Ma'ruf dan Wihastuti, 2008). Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ma'ruf dan Wihastuti, 2008).

2. Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pemerintah selalu mengusahakan agar aliran modal yang masuk ke Indonesia semakin tinggi, hal ini agar sesuai dengan harapan yaitu semakin besarnya dana yang diperlukan dalam pembangunan, utamanya bagi pembangunan dalam bidang ekonomi. Pemerintah selalu berupaya dalam menarik dana investor asing dengan mempermudah kegiatan investasi melalui berbagai kebijakan sesuai dengan kebutuhan dana pembangunan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 merupakan salah satu kebijakan yang telah dibentuk pemerintah tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam UU ini, yang dimaksud dalam Penanaman Modal Asing (PMA) hanya investasi yang meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dijalankan berdasarkan ketentuan UU yang ditetapkan dalam mengoperasikan perusahaan di Indonesia. Dengan pengertian bahwa secara langsung pemilik modal yang menanggung resiko dari penanaman modal asing tersebut. Adapun yang dibahas pada Undang-Undang ini yaitu sebagai berikut (Malik dan Kurnia, 2017):

- a. Undang-Undang ini dengan jelas hanya mengatur tentang Penanaman Modal Asing dan tidak mengatur kredit atau peminjaman modal.

- b. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut berkesempatan untuk menjalankannya menggunakan modal asing sebelumnya.
- c. Penanaman modal asing (*Foreign direct investment*) dalam hal ini tidak hanya modal tetapi juga kekuasaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala kebutuhannya tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia.
- d. Investor secara penuh menanggung Penggunaan kredit dan resikonya.

3. Bentuk Investasi Asing

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu:

- a. *Investasi Portofolio*: *Investasi portofolio* dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam *investasi portofolio*, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (*emiten*), belum tentu membuka lapangan kerja baru (Anoraga, 2006 dalam Jufrida dkk, 2016).
- b. *Investasi Langsung*: Penanaman modal asing (PMA) atau *Foreign direct investment (FDI)* terdiri dari aset – aset nyata yaitu pembelian tanah yang digunakan sebagai sarana produksi, pembangunan pabrik, pembelanjaan peralatan inventaris didampingi dengan fungsi – fungsi manajemen yang ada (Ningrum dan Indrajaya, 2018).

Investasi portofolio dengan penanaman modal asing mempunyai perbandingan yaitu banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh penanaman modal asing sifatnya jangka panjang, dalam pembukaan lapangan kerja yang baru, dan memberikan kontribusi dalam alih teknologi dan keterampilan manajemen. Penanaman modal asing juga dapat memodernisasi masyarakat dan memperkuat sektor swasta. Penggunaan modal asing penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara yang berkembang (Jhingan, 2000 dalam Ningrum dan Indrajaya, 2018). Investasi akan terus dijalankan apabila produktifitas batas dari investasi itu masih lebih tinggi daripada tingkat yang akan diterimanya melalui dipinjamkan dan tidak diinvestasikan (Sobri, 1984 dalam Ningrum dan Indrajaya, 2018).

4. Teori Penanaman Modal Asing (PMA)

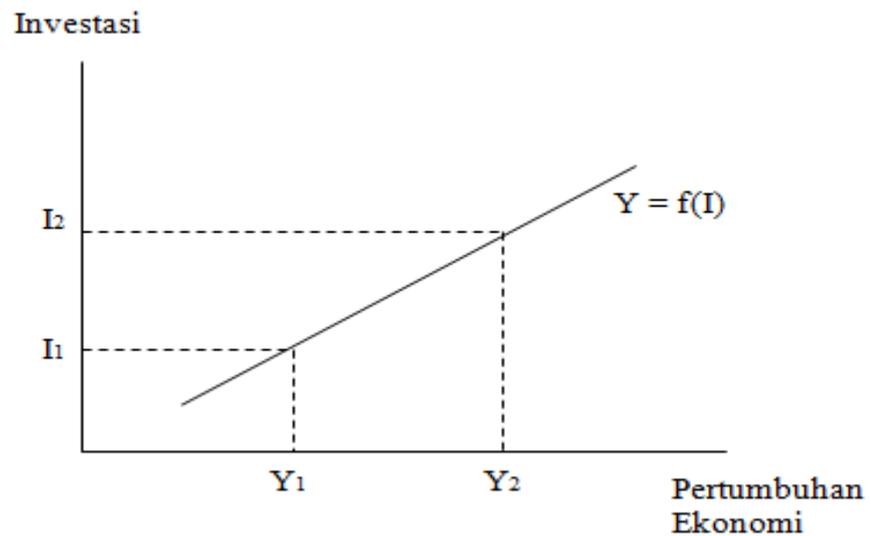
Penanaman Modal Asing (PMA) atau yang disebut dengan FDI (*Foreign Direct Investment*) terjadi ketika sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka waktu panjang ke perusahaan di negara lain. Negara asal perusahaan yang menanam modal itu disebut *host country* sementara negara tempat investasi yang dituju disebut *home country* (Igamo, 2015).

Menurut Muchammad Zaidun, dalam ilmu hukum investasi terdapat 3 ragam pemikiran dalam menafsirkan kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan atau kebijakan hukum

investasi dari kepentingan negara penerima modal (*home country*), yakni :

a. *Neo Classical Economic theory*

Teori ini menjelaskan bahwa masuknya investasi membawa dampak yang positif dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *home country*. Hal ini menunjukkan bahwa modal asing yang dibawa ke penerima modal akan mendorong modal domestik yang kemungkinan digunakan untuk berbagai usaha.



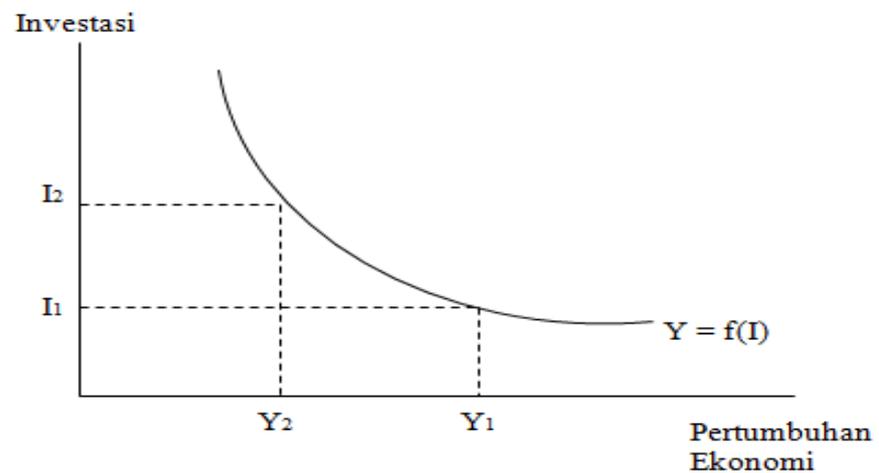
Gambar 2.1
Hubungan Investasi dan pertumbuhan ekonomi
(Sukirno, 2000)

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa ketika masuknya investasi asing yang dianggap bermanfaat mengalami peningkatan dari I_1 ke I_2 , mengakibatkan naiknya pertumbuhan

ekonomi dari Y_1 menjadi Y_2 . Hal ini sejalan dengan kesimpulan Sornarajah dalam (Muchammad Zaidun, 2008) yang menyatakan bahwa investasi asing sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi penerima modal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

b. *Dependency Theory*

Teori ini tidak menerima masuknya investasi asing, dan memandang masuknya investor asing dapat melumpukan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investor asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran hak-hak azazi manusia ataupun lingkungan.



Gambar 2.2
Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi
(Mankiw, 2003)

Gambar diatas menggambarkan kenaikan investasi asing dari I_1 ke I_2 , menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi

dari Y_1 menjadi Y_2 . Sesuai dengan teori ini yang juga berpendapat bahwa, penanaman modal asing atau investasi asing di negara berkembang tidak menghasilkan pembangunan ekonomi yang berarti. Investasi asing menghambat pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pemasukan di negara penerima modal (Sornarajah, 2010).

c. *The Middle Path Theory*

Penganut teori ini menganggap bahwa masuknya investasi asing selain banyak manfaat juga menimbulkan dampak negatif, karenanya negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh- sungguh dalam penegakan hukum.

5. Investasi dalam Perspektif Islam

Islam memandang bahwa manusia pada hakekatnya merupakan satu kesatuan kehidupan yang besar karena semua umat manusia berasal dari satu keturunan yaitu nabi Adam as. Allah SWT sebagai pencipta atas alam semesta ini menyediakan semua sarana yang tersedia diperuntukkan bagi kesejahteraan semua umat manusia bukan hanya untuk satu golongan masyarakat atau satu bangsa tertentu. Pandangan ini yang kemudian melahirkan perilaku ekonomi yang ramah dan simpatik karena aktivitas ekonomi senantiasa dibangun dengan prinsip saling tolong menolong dan saling membantu seperti halnya kegiatan investasi (Yuliadi, 2016).

Asumsi dasar ekonomi Islam berpijak pada tujuan yang akan diwujudkan dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Assunnah (Yuliadi, 2016), yaitu:

- a. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan pendapatan pada individu atau sekelompok masyarakat yang menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) yang mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan bagi setiap individu
- c. Kesamaan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan
- d. Mendorong terwujudnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja
- e. Mendorong masyarakat taat pada nilai-nilai moral dan aturan yang berlaku untuk terwujudnya kehidupan yang tertib dan teratur.

Aktivitas ekonomi Islam sangat mendukung adanya kegiatan investasi, karena dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang dimiliki tidak hanya untuk disimpan melainkan harus di produktifkan agar mendatangkan manfaat bagi orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ؕ

“supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”. (QS. Al-Hasyr (59): 7).

Oleh karena itu dasar pijakan dari kegiatan ekonomi termasuk investasi yaitu Al-Qur'an dan Hadis SAW. Selain itu, investasi dalam ekonomi islam harus dijalankan atas dasar norma dan kaidah yang bersumber dari shari'ah. Beberapa kaidah dan norma shari'ah yang berkaitan dengan kegiatan investasi yaitu sebagai berikut (Fathurrahman, 2012):

- a. *al Mashru'iyah* yaitu sah menurut hukumshara'. *Legalitasshar'i* yang diperlukan dalam investasi Islam meliputi objek atau bidang garapan proyek investasi. Dalam hal ini berlaku kaidah shar'iyah bahwa objek atau bidang garapan proyek itu tidak bertentangan dengan teks-teks al Qur'an dan hadith Nabi SAW yang jelas (*sarih*) dan pasti (*qat'i*).
- b. Memperlihatkan kemaslahatan sosial menurut skala prioritas shar'i. Selaras dengan ruh Islam yang mengarahkan pada kebaikan dan keluhuran akhlak, maka investasi Islami diprioritaskan kepada yang terbaik dan yang terpenting bagi masyarakat.
- c. Adanya korelasi antara laba dengan kerja dan reslko (*mukhatarah*). Investasi dalam Islam berarti menggabungkan secara aktif antara kerja dan modal (harta). Reslko yang mungkin terjadi di dalam investasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat

profit, dan tidak ada kepastian jaminan secara mutlak bagi investor karena memastikan sesuatu yang belum pasti itu dilarang.

- d. Berusaha mendapatkan laba dan keuntungan secara merata. Menjadi suatu kewajiban apabila penanam modal menginginkan keuntungan yang tinggi pada setiap kegiatan investasi, karena memang tujuan investasi yaitu untuk mengembangkan modal. Akan tetapi *profit* yang diharapkan alangkah baiknya ditingkatkan dengan kata-kata "adil" atau *fairprofit* dan *just profit*.
- e. Harta yang bertambah sebanding dengan infak yang bertambah. Investasi bertujuan bukan semata-mata untuk menambah harta, melainkan juga untuk menambah Infak. Tujuan investasi tidak hanya untuk ekonomi tetapi juga sosial.

Islam menyarankan agar menginvestasikan sebagian harta yang berlebih agar tidak terjadi kebekuan harta, yang seharusnya harta tersebut dapat memberi manfaat dan menolong orang lain, serta menggerakkan perekonomian. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "barang siapa yang mengasuh anak yatim yang berharta, hendaklah menginvestasikan harta itu (sebagai modal dagang), tidak membiarkannya agar tidak habis dimakan oleh zakat" (HR. Hasai' dan Turmudzi, dalam Fathurrahman, 2012). Dalam islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut dibiarkan, maka lambat tahun akan dimakan oleh zakatnya. Salah satu pelajaran dari zakat ini yaitu dapat memotivasi setiap muslim agar berinvestasi. Khalifah

Umar bin Khattab juga menegaskan agar modal mereka digunakan secara produktif dengan berkata: “mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya.” Hal ini menunjukkan bahwa islam sangat menganjurkan umatnya agar melakukan investasi (Fathurrahman, 2012).

Adapun investasi menurut Al-Qur’an, diantaranya yaitu:

a. QS. Al-Baqarah [2]: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Ayat ini secara tersirat menjelaskan tentang pentingnya berinvestasi, dimana ayat ini menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya secara *financial* (keuangan) kemudian menginfakan hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu dengan usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan bahkan

ratusan ribu orang yang tidak mampu untuk berproduksi ke arah yang lebih baik lagi.

b. An-Nisa [4]: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا إِلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah secara moral maupun material. Secara implisit ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini akan di wariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri.

c. QS. Yusuf [12]: 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا
قَلِيلًا مِمَّا أَكُلُونَ ٤٧
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا
قَلِيلًا مِمَّا تُخْصِنُونَ ٤٨

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ

يَعَصِرُونَ ٤٩

“yusuf berkata: supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kau biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”

Hikmah yang dapat diambil dari ayat ini yaitu bahwa manusia haruslah mampu menyimpan sebagian hartanya untuk memprediksi kejadian yang akan datang di kemudian hari. Artinya manusia hanya bisa berargumen dan menduga apa yang akan terjadi di hari esok, sedangkan secara pastinya hanya Allah yang Maha Mengetahui. Oleh sebab itu perintah dari Nabi Yusuf dalam ayat ini menyimpan sebagian sebagai cadangan untuk dikonsumsi di kemudian hari dengan hal yang baik. Begitu pula dengan menginvestasikan sebagian dari sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya di simpan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa islam sangat menganjurkan investasi tetapi tidak dalam semua bidang. Aturan-aturan diatas menjelaskan batasan-batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tujuannya semata-mata untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang dapat merugikan masyarakat.

B. Produk Domestik Bruto

1. Pengertian Produk Domestik Bruto

PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB) sering kali dipakai sebagai ukuran kesejahteraan dari suatu negara. Sebenarnya PDB dan PNB ini memiliki beberapa perbedaan konsep yang mendasar. PDB mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah negara (Indonesia) tanpa membedakan kepemilikan/ kewarganegaraan pada suatu periode tertentu. Warga negara yang bekerja di negara lain, pendapatannya tidak dimasukkan dalam perhitungan PDB. Sedangkan PNB Indonesia mencerminkan barang dan jasa yang diproduksi warga negara Indonesia (baik di Indonesia maupun di luar negeri), tetapi tidak mengikutsertakan produk WNA yang berada di Indonesia. Pada umumnya untuk negara berkembang seperti Indonesia, nilai PDB lebih besar dari nilai PNB karena penanaman modal asing yang lebih besar dibandingkan dengan hasil produk warga negaranya di luar negeri. Oleh karena itu di negara berkembang, PDB lebih disukai untuk mengukur tingkat kesejahteraan (Tedy Herlambang dkk, 2002 dalam Prasetyanto, 2016).

Produk Domestik Bruto (PDB) juga didefinisikan sebagai nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi didalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). Produk Domestik Bruto (PDB) tidak sama dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja

di negara tersebut. Sehingga produk domestik bruto hanya menghitung total produksi dalam suatu negara dan tidak memperhatikan apakah produksi itu dilakukan dengan menggunakan faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, produk nasional bruto memperhitungkan asal mula faktor produksi yang digunakan (Suparmoko, 2000 dalam Fadilah, 2017).

Pengeluaran-pengeluaran dari penggunaan Produk Domestik Bruto, (Prasetyanto, 2016) adalah sebagai berikut:

a. Konsumsi Rumah Tangga

pengeluaran konsumsi rumah tangga diartikan sebagai nilai perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Penghasilan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan makanan, berbelanja pakaian, membayar jasa pengangkutan, menyelesaikan pendidikan anak, membiayai sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga agar terpenuhi kebutuhannya dan perbelanjaan tersebut disebut konsumsi. Kegiatan rumah tangga untuk membeli rumah termasuk dalam berinvestasi.

b. Pengeluaran Pemerintah

Konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah. Pembelian atas barang dan

jasa yang akan dikonsumsi, seperti membiayai gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas untuk digunakan serta membeli bensin untuk transportasi pemerintah disebut konsumsi pemerintah. Sedangkan pembangunan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi tergolong sebagai investasi pemerintah.

c. Pembentukan Modal Tetap Sektor Swasta

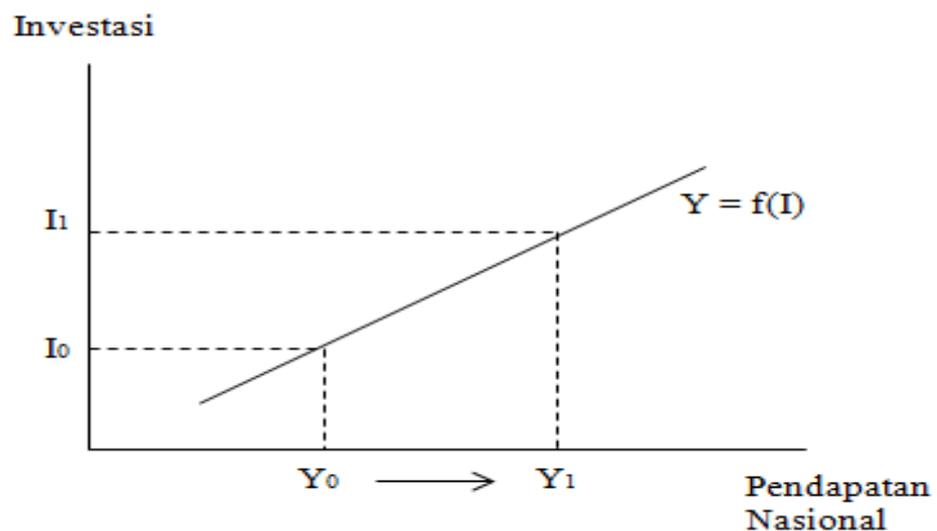
Pembentukan modal tetap sektor swasta atau yang lebih dinamakan sebagai investasi, pada hakikatnya diartikan sebagai pengeluaran dalam mengkonsumsi barang modal yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa di masa mendatang. Pembangunan gedung perkantoran, pendirian bangunan industri, pembelian alat-alat memproduksi merupakan sebagian bentuk pengeluaran yang tergolong sebagai investasi.

d. Ekspor neto

Ekspor neto merupakan nilai ekspor yang dijalankan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu dan dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama. Ekspor suatu negara, seluruh atau sebagian dari nilainya, merupakan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri.

Menurut Keynes, tingkat pendapatan, dan juga tingkat bunga dapat mempengaruhi besarnya tabungan. Dalam kondisi equilibrium

besarnya tabungan dengan investasi haruslah sama, dan ini mengartikan bahwa besarnya tingkat investasi sebenarnya yaitu bergantung juga pada tingkat pendapatan, artinya apabila pendapatan semakin tinggi maka tingkat investasi juga semakin tinggi atau sebaliknya. (Putong, 2009 dalam Fadilah, 2017).



Gambar 2.3
Investasi Terpengaruh (Sukirno, 2000)

Sukirno (2000) menjelaskan bahwa pada umumnya investasi yang dilakukan pengusaha adalah berbentuk investasi otonom. Perlu kita sadari bahwa tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan demikian permintaan barang-barang dan jasa-jasa juga meningkat sehingga, keuntungan yang akan diperoleh perusahaan akan bertambah tinggi dan hal ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Maka apabila pendapatan nasional meningkat investasi juga mengalami peningkatan.

Apabila dimisalkan keterkaitan antara investasi dan pendapatan nasional adalah seperti pada gambar diatas (Sukirno, 2000).

Pada gambar 2.3 menunjukkan kenaikan pendapatan nasional dari Y_0 menjadi Y_1 yang mengakibatkan naiknya investasi dari I_0 menjadi I_1 . Artinya apabila pendapatan nasional meningkat maka investasi juga meningkat. Investasi yang bercorak demikian dinamakan investasi terpengaruh.

2. Jenis-jenis Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domoestik Bruto dibagi menjadi dua yaitu PDB nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) dan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan), (Mankiw, 2007 dalam Prasetyanto, 2016):

- a. PDB nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB nominal tidak mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya, karena tidak menunjukkan ketersediaan barang dan jasa secara nyata yang dibutuhkan konsumen, perusahaan, maupun pemerintah.
- b. PDB riil menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB riil lebih baik dari pada PDB nominal untuk mengukur kemakmuran ekonomi karena menghitung pengeluaran barang dan jasa dan tidak akan

dipengaruhi oleh perubahan harga. PDB atas dasar harga berlaku bisa digunakan dalam melihat mengawasi pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

3. Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB dapat dihitung dengan memakai tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah bruto (*gross value added*) dari semua sektor produksi. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 11 sektor ekonomi (Yuliadi, 2016) yaitu:

- 1) Sektor Pertanian
- 2) Sektor Pertambangan dan penggalian
- 3) Sektor Industri
- 4) Sektor konstruksi
- 5) Sektor listrik dan gas
- 6) Sektor pengangkutan dan komunikasi
- 7) Sektor perdagangan
- 8) Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya
- 9) Sektor sewa rumah
- 10) Sektor pemerintah
- 11) Sektor jasa-jasa

b. Pendekatan Pendapatan

PDB diperoleh dengan menghitung jumlah balas jasa bruto (belum dipotong pajak) dari faktor produksi yang dipakai. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Dimana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha (Tedy Herlambang, dkk, 2002 dalam Prasetyanto, 2016). Pendekatan ini biasa dituliskan sebagai berikut:

$$\text{PDB} = \text{sewa} + \text{upah} + \text{bunga} + \text{laba}$$

c. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan Pengeluaran Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari unit/ komponen-komponen ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga (C), perusahaan berupa investasi (I), pengeluaran/ belanja pemerintah (G), dan ekspor dikurangi impor (X – M) (Tedy Herlambang, dkk, 2002 dalam Prasetyanto, 2016). Pendekatan ini biasa dituliskan sebagai berikut:

$$\text{PDB} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + (\text{X} - \text{M})$$

Secara teori, pendekatan pengeluaran dan pendapatan dalam PDB harus menghasilkan angka yang sama. Akan tetapi

dalam prakteknya pendekatan pendapatan lebih sulit dilakukan dalam menghitung PDB, maka pendekatan pengeluaran yang lebih sering digunakan (Tedy Herlambang, dkk, 2002 dalam Prasetyanto, 2016).

C. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam waktu tertentu. pengertian lainnya dari inflasi yaitu mengarah kepada seluruh harga untuk membuatnya naik dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Harga yang naik dari beberapa barang saja belum dapat dikatakan inflasi, melainkan ketika kenaikan tersebut menyeluruh terhadap (atau mengakibatkan) keseluruhan dari harga barang-barang lain (Septiatin dkk, 2016).

Menurut Septiatin dkk (2016), Inflasi datang dikarenakan adanya tekanan dari sisi permintaan *demand-pull inflation* dan *Cost-push inflation* yang diakibatkan oleh penurunan produksi karena biaya produksi yang sedang naik (kenaikan biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan naiknya upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya). Demand-pull inflation dapat disebabkan oleh adanya kenaikan

permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran produksi agregat (Septiatin dkk, 2016).

Adapun dampak inflasi dalam negeri terhadap masuknya Modal Asing oleh suatu negara dapat dijelaskan melalui *Fisher Effect* (Mahyus, 2015). Suku bunga nominal dan suku bunga riil dalam teori tersebut dibedakan oleh para ekonom. Rate yang dapat diamati di pasar disebut dengan suku bunga nominal, sedangkan konsep yang mengukur tingkat kembalian setelah dikurangi dengan inflasi disebut dengan suku bunga riil (Sugiartiningsih, 2017). Efek ekspektasi inflasi terhadap suku bunga nominal disebut dengan efek Fisher (*Fisher effect*) dan hubungan antara inflasi dan suku bunga digambarkan dalam persamaan *Fisher* (Sugiartiningsih, 2017). Rumusan ini berasal dari penurunan rumus:

$$i = [(1+i_r)(1+\pi_e)] - 1, \text{ dengan operasi distributive diperoleh}$$

$$i = i_r + \pi_e + i_r\pi_e, \text{ perkalian } i_r\pi_e \text{ terlalu kecil, sehingga : } i = i_r + \pi_e \text{ (Sugiartiningsih, 2017)}$$

Dari persamaan di atas menunjukkan bahwa tingkat suku bunga nominal (i) sama dengan tingkat suku bunga riil (i_r) ditambah dengan ekspektasi inflasi (π_e). Dengan demikian persamaan tersebut juga menggambarkan bahwa tingkat suku bunga dapat berubah karena dua hal, perubahan pertama dikarenakan tingkat suku bunga riil (i_r) dan perubahan kedua, dikarenakan ekspektasi inflasi (π_e). Hal tersebut

dapat diartikan, meningkatnya ekspektasi inflasi akan mendorong peningkatan suku bunga nominal. Oleh karena itu pada suku bunga nominal akan cenderung mengandung ekspektasi inflasi untuk memberikan tingkat kembalian riil atas penggunaan uang (Sugiartningsih, 2017).

Sesuai *teori Fisher* apabila inflasi suatu negara mengalami peningkatan maka suku bunga dalam negeri juga mengalami peningkatan. Disisi lain keputusan investor asing dalam menanamkan modalnya sangat dipengaruhi oleh kondisi suku bunga suatu negara. Berarti secara tidak langsung pengaruh inflasi terhadap Penanaman Modal Asing di suatu negara dapat terjadi melalui pengaruhnya pada bunga domestik (Sugiartiningsih, 2017)

Berdasarkan pernyataan diatas, semakin tinggi inflasi suatu negara maka semakin tinggi pula suku bunga dalam negeri. Kondisi seperti ini mengakibatkan penerimaan investasi suatu negara mengalami penurunan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *teori Klasik* bahwa antara suku bunga dalam negeri dan besarnya penerimaan investasi suatu negara memiliki hubungan terbalik (Sadono Sukirno, 2003 dalam Sugiartiningsih, 2017). Dengan demikian meningkatnya inflasi suatu negara maka akan diikuti oleh kenaikan suku bunganya yang selanjutnya mengakibatkan turunya jumlah investasi yang diterima oleh negara.

2. Macam-macam inflasi

Inflasi dalam teori ekonomi dapat dibedakan menjadi beberapa macam dalam pengelompokan tertentu yaitu:

- a. Penggolongan inflasi berdasarkan besarnya ada empat macam, yaitu (Yuliadi, 2008):
 - 1) Inflasi rendah adalah inflasi dengan laju dibawah dari 10 % per tahun, inflasi ini juga disebut dengan inflasi di bawah dua digit. Inflasi ini tidak memiliki pengaruh yang merusak pada perekonomian.
 - 2) Inflasi sedang adalah inflasi yang berada antara 10 % sampai 30 % per tahun. Dampak yang diberikan cukup dirasakan oleh masyarakat yang penghasilanya tetap.
 - 3) Inflasi tinggi adalah inflasi yang berada antara 30 % sampai 100 % per tahun. Terjadiya inflasi tinggi ini karena tidak stabilnya kondisi politik dan menghadapi krisis yang berkepanjangan. Pada inflasi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi seperti perbankan.
 - 4) *Hyperinflation* adalah inflasi yang berada diatas 100 % per tahun dan dapat mengakibatkan krisis perekonomian yang panjang. Situasi ini ditandai dengan adanya pergantian pemerintahan atau rezim dan pergolakan politik. Perekonomian

melemah dikarenakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang beredar.

b. Penggolongan inflasi berdasarkan sifatnya ada tiga macam, yaitu (Yuliadi, 2008):

1) Inflasi merayap (*creeping inflation*), adalah inflasi dengan laju yang relatif rendah yaitu dibawah 10% per tahun. Pergerakan inflasi berjalan secara lambat dan dalam waktu yang tidak singkat. Menurut sifatnya tersebut, inflasi merayap tidak menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perekonomian.

2) Inflasi menengah (*galloping inflation*), adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan yang relatif cukup besar biasanya berada antara dua digit atau di atas 10%. Sifat inflasi ini berjalan dengan tempo yang singkat serta berdampak akseleratif dan akumulatif artinya inflasi bergerak dengan laju yang semakin besar.

3) Inflasi tinggi (*hyper inflation*), adalah inflasi dengan tingkat yang sangat tinggi dan dapat mengakibatkan efek yang merusak perekonomian karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai uang. Dalam jangka pendek harga barang naik berkali-kali lipat.

c. Penggolongan inflasi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua (Boediono, 2001: 156), yaitu:

- 1) *Demand inflation*, adalah inflasi yang datang karena permintaan masyarakat akan berbagai barang yang terlalu besar.
 - 2) *Cost inflation*, adalah inflasi yang timbul karena ongkos produksi yang sedang naik.
- d. Penggolongan inflasi berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua (Boediono, 2001), yaitu:
- 1) *Domestic inflation*, adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga (inflasi) di luar negeri atau di negara-negara yang berlangganan di negara kita. Inflasi dari dalam negeri ini timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang di biayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal dan lain sebagainya.
 - 2) *Imported inflation*, adalah penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri di akibatkan misalnya karena ada kenaikan barang-barang ekspor, dan saluran-salurannya sedikit berbeda dengan penularan lewat kenaikan harga barang-barang impor.
3. Teori inflasi

Secara umum ada 3 teori mengenai inflasi, dari masing-masing teori ini menggambarkan aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup seuruh aspek penting dari proses kenaikan harga. Menurut Boediono (2001), teori tersebut diantaranya yaitu:

a. Teori Kuantitas

Teori kuantitas mengenai inflasi menyebutkan bahwa penyebab utama terjadinya inflasi yaitu penambahan jumlah uang beredar dan “psikologi” masyarakat tentang kenaikan harga-harga di masa mendatang. Tambahan jumlah uang beredar 1% dapat menumbuhkan inflasi kurang dari 1%, sama dengan 1% atau lebih besar dari 1%, tergantung kepada apakah masyarakat tidak mengharapkan harga naik lagi, akan naik tetapi tidak lebih buruk daripada sekarang atau masa-masa lampau, atau akan naik lebih cepat dari sekarang, atau masa-masa lampau.

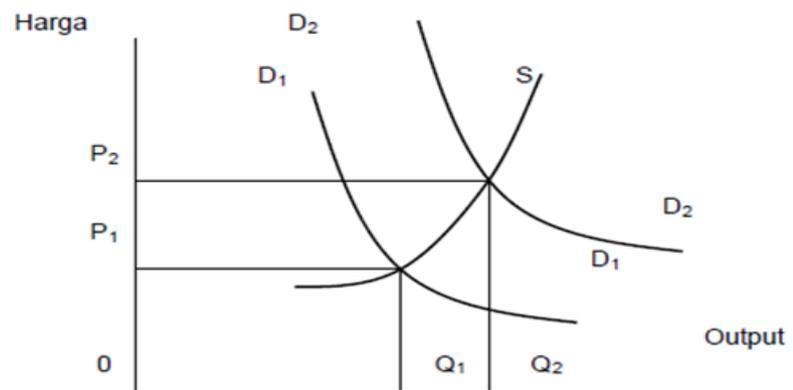
Basuki dan Prawoto (2014) menyimpulkan bahwa teori kuantitas membedakan sumber terjadinya inflasi yang dibagi menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya, artinya inflasi bisa disebabkan oleh sisi permintaan dan sisi penawaran, yaitu sebagai berikut:

1) Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi yang diakibatkan karena banyaknya permintaan masyarakat akan berbagai barang, hal ini mengakibatkan tingkat harga naik secara umum (misalnya karena pengeluaran masyarakat/perusahaan bertambah).

Berdasarkan gambar 2.4, perekonomian terjadi ketika P_1 dan tingkat output riil dimana (P_1, Q_1) berada

pada perpotongan antara kurva permintaan D1 dan kurva penawaran S. Kurva permintaan bergeser keluar D2, pergeseran tersebut dapat dikarenakan adanya faktor kelebihan pengeluaran permintaan.



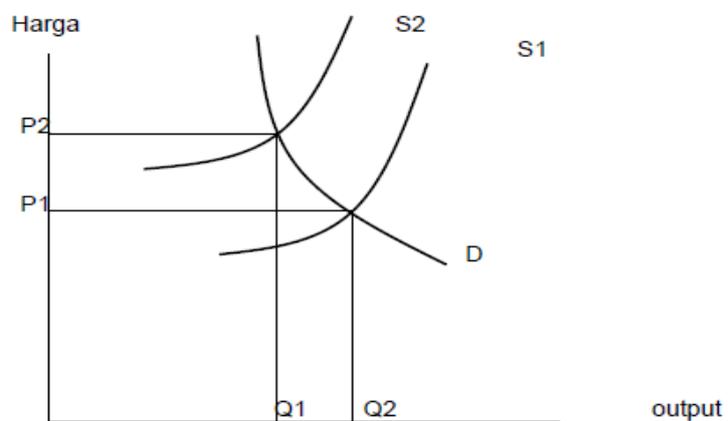
Gambar 2.4
Terjadinya *Demand pull Inflation*
(Basuki dan Prawoto, 2014)

Pergeseran kurva permintaan menaikkan output riil (dari Q1 ke Q2) dan tingkat harga (dari P1 ke P2), hal inilah yang dinamakan *demand pull inflation* (inflasi tarikan permintaan) yang diakibatkan pergeseran kurva permintaan menarik ke atas tingkat harga dan menyebabkan inflasi. Contoh terjadinya kenaikan permintaan barang dapat disebabkan adanya kenaikan gaji/upah pegawai secara nasional, kondisi menjelang lebaran dan lain sebagainya.

2) Inflasi Dorongan Penawaran

Inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi biasanya ditandai dengan kenaikan harga barang serta penurunan produksi (seperti kenaikan harga barang baku yang didatangkan dari luar negeri, kenaikan harga BBM).

Berdasarkan gambar 2.5, telah disajikan kurva penawaran yang bergeser dari S1 ke S2 dan harga tertentu naik dan menyebabkan inflasi dorongan biaya. Kenaikan harga dan penurunan output ini disebut "*stagnasi inflasi*".



Gambar 2.5

Terjadinya *Cost Push Inflation* (Basuki dan Prawoto, 2014)

b. Teori Keynes

Teori Keynes mengatakan bahwa terjadinya inflasi diakibatkan karena masyarakat hidup diluar batvs kemampuan ekonomisnya. Teori ini memandang bagaimana perebutan

rezeki antara golongan-golongan masyarakat dapat menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia (yaitu, ketika timbul “inflationary gap”). Selama inflationary gap tetap ada, selama itu pula proses inflasi berlanjut.

c. Teori strukturalis

Teori strukturalis yaitu teori inflasi “jangka panjang” karena memandang sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya ketegaran suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab “structural” penambahan produksi barang-barang ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya yaitu terjadinya kenaikan harga-harga lain, sehingga inflasi terjadi. Inflasi seperti ini tidak dapat dicegah hanya dengan mengurangi jumlah uang beredar, tetapi harus dicegah dengan pembangunan sektor bahan makanan dan ekspor.

D. Tingkat Suku Bunga

1. Pengertian Tingkat Suku Bunga

Suku bunga merupakan biaya peminjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman. Suku bunga dapat berpengaruh dalam kesehatan ekonomi secara menyeluruh, hal ini dikarenakan suku

bunga tidak hanya dapat mempengaruhi kesediaan konsumen untuk berkonsumsi atau menabung, tetapi juga mempengaruhi keputusan investor ketika berinvestasi (Mishkin, 2008 dalam Rachmawati, 2015).

Ada dua jenis Suku bunga bank menurut Khalwaty (2010), yaitu:

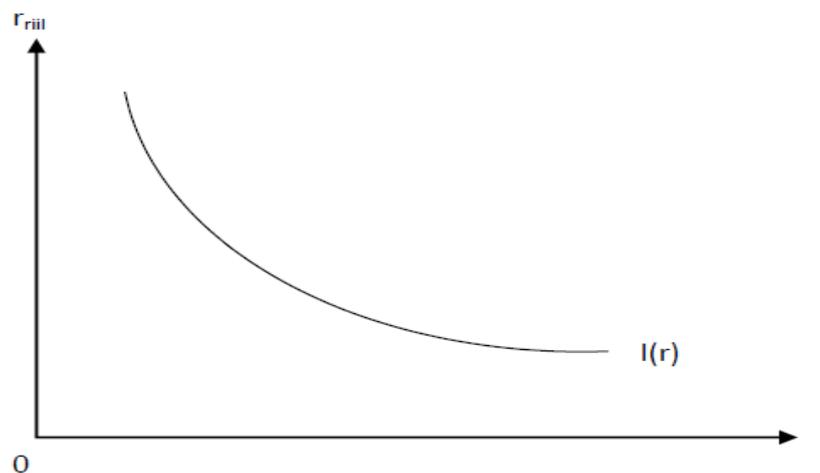
- a. Suku bunga nominal yaitu suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini adalah jenis nilai yang bisa diketahui secara umum. Suku bunga ini menandakan jumlah rupiah dalam setiap satu rupiah yang digunakan untuk investasi.
- b. Suku bunga riil yaitu suku bunga yang sudah dikoreksi karena inflasi dan disebut sebagai suku bunga nominal yang dikurangkan dengan laju inflasi.

Dalam aktivitas perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu (Kashmir, 2009 dalam Purnomo dan Widyawati, 2013):

- a. Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.
- b. Bunga pinjaman merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam

kepada bank. Setiap masyarakat yang mempunyai hubungan dengan bank, baik itu hubungan dalam bentuk simpanan, maupun pinjaman (kredit), akan selalu terkait, dan dikenakan dengan yang namanya bunga.

Adapun perbedaan pandangan mengenai faktor yang mempengaruhi investasi apakah dipengaruhi tingkat bunga nominal ataukah tingkat bunga riil. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang dilaporkan secara resmi dan menentukan besarnya biaya modal yang dibayar investor dari meminjam uang. Sedangkan tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal dengan memasukkan besarnya tingkat inflasi (Yuliadi, 2016).



Gambar 2.6
Fungsi Investasi Melalui Tingkat Suku Bunga
(Yuliadi, 2016)

Fungsi investasi menjelaskan hubungan antara besarnya jumlah investasi dengan tingkat bunga riil dimana sifat hubungannya adalah negatif yaitu jika tingkat bunga riil turun, maka tingkat investasi akan

meningkat dan sebaliknya. Sifat hubungan negatif antara tingkat bunga riil dengan jumlah investasi dijelaskan dalam kurva investasi dengan lereng negatif (Yuliadi, 2016), sebagaimana terlihat pada gambar 2.6:

Menurut Mankiw (2003) bahwa Investasi tergantung pada tingkat bunga riil, karena tingkat bunga merupakan harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman. Fungsi investasi disini yaitu miring kebawah, jadi apabila tingkat suku bunga naik maka semakin sedikit masuknya investasi di suatu negara.

Teori klasik mengatakan bahwa ketika pendapatan dari investasi (*return of investment*) lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku maka investasi akan dijalankan (Sriwardiningsih, 2010). Teori klasik mempunyai pertimbangan untuk mengadakan investasi dengan menetapkan patokan tingkat suku bunga. Dalam kondisi ini, dari sudut pandang *The General Theory Keynes*, maka penganut Keynesian sangat meyakini adanya campur tangan pemerintah untuk mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik (Sriwardiningsih, 2010).

Tandelilin (2010) dalam Rachmawati (2015) mengatakan semakin tinggi tingkat bunga dapat mempengaruhi nilai sekarang aliran kas perusahaan sehingga tidak ada ketertarikan lagi dalam berinvestasi. Pada dasarnya dalam menentukan pendapatan bersih perusahaan akan dikurangi dengan beban bunga. Semakin tingginya

beban bunga maka dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga bisa berpengaruh terhadap harga sahamnya.

2. Fungsi Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan masyarakat.

Menurut Puspoprano (2004) dalam Nginang (2017), tingkat suku bunga mempunyai fungsi atau peran penting dalam perekonomian, yaitu :

- a. Membantu mengalirnya tabungan berjalan kearah investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
- b. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tinggi.
- c. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
- d. Merupakan alat penting terkait kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2004) dalam Nginang (2017) adalah :

- a. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
- b. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian.
- c. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

3. Teori Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (Loanable funds). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Budiono, 1994 dalam Malisa dan Fakhrudin, 2017).

a. Teori Suku Bunga Klasik

Tingkat suku bunga dalam teori Klasik yang beranjak dari teori mikro merupakan nilai balas jasa dari modal menurut teori Klasik, bahwa fungsi dari suku bunga adalah menabung. Tingginya tingkat suku bunga akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan mendorong masyarakat untuk mengorbankan atau

mengurangi pengeluaran dalam berkonsumsi guna meningkatkan tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang semakin tinggi, membuat keinginan masyarakat untuk melakukan investasi semakin kecil. Hal ini karena penggunaan dana (*cost of caital*) menjadi semakin mahal. Sebaliknya tingkat suku bunga yang semakin rendah membuat keinginan masyarakat untuk melakukan lebih banyak investasi (Nasution, 1991 dalam Fahrika, 2016).

Teori klasik juga menjelaskan bahwa tingkat bunga merupakan nilai balas jasa dari modal. Dalam teori klasik stok barang modal dicampuradukan dengan uang dan keduanya dianggap mempunyai hubungan substitutif. Semakin rendah modal, semakin tinggi suku bunga. Sebaliknya, semakin banyak modal semakin rendah tingkat suku bunga (Sappewali, 2001 dalam Malisa dan Fakhruddin, 2017).

b. Teori Suku Bunga Keynes

Menurut keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan (GNP), sepanjang uang ini akan mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk melakukan investasi. (Nopirin, 2000 dalam Malisa dan Fakhruddin, 2017).

E. Kurs Rupiah

1. Pengertian Kurs

Kurs merupakan harga suatu mata uang terhadap nilai mata uang negara lainnya. Ketika hendak membandingkan harga segenap barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara dapat diketahui dari nilai tukar suatu mata uang negara tersebut. Apabila mata uang suatu negara menguat terhadap nilai mata uang lainnya maka harga produk negara itu semakin mahal bagi pihak luar negeri dan sebaliknya apabila nilai mata uang suatu negara melemah terhadap mata uang lainnya maka harga produk negara tersebut akan semakin murah bagi pihak luar negeri. Sehingga dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurs atau nilai tukar yang selalu berfluktuasi dan relatif tidak stabil akan membawa dampak buruk bagi kondisi perekonomian negara tersebut, hal ini membuat para investor asing untuk tidak melakukan investasi di negara tersebut (Tambunan, 2015).

Haryadi (2007) dalam Hodijah (2015) mengatakan kuat tidaknya sebuah mata uang dapat ditentukan dengan kebutuhan (permintaan dan penawaran) akan valuta asing. Ada juga yang berpendapat kuat tidaknya mata uang suatu negara menggambarkan kuat tidaknya perekonomian negara tersebut, atau bisa juga stabil tidaknya suatu negara. Apabila mata uang negara tersebut kuat dan stabil, setidak-tidaknya dapat dijadikan salah satu indikasi bahwa perekonomian negara tersebut adalah kuat dan stabil pula. Artinya,

terdapat korelasi negatif antara kestabilan dan kekuatan ekonomi suatu negara terhadap mata uangnya.

Teori paritas balas jasa menyatakan bahwa ada dua hal sumber balas jasa investasi asing di dalam negeri yaitu : perbedaan suku bunga dalam negeri dan luar negeri serta perbedaan nilai tukar mata uang pada saat investasi dilakukan. Kedua hal tersebut secara matematis dirumuskan sebagai berikut (Sambodo, 2003 dalam Astuty, 2017):

$$D1 = [F(1-r_f)/e] - (1+r_d),$$

Dimana:

D1 = Selisih balas jasa investasi di dalam dan luar negeri

F = Kurs devisa yang berlaku saat investasi akan jatuh tempo

e = Kurs devisa yang ditetapkan pada saat investasi mulai dijalankan

r_f = Suku Bunga luar negeri

r_d = Suku Bunga dalam negeri

Apabila diasumsikan dalam jangka panjang bahwa suku bunga di luar negeri sebanding dengan suku bunga di dalam negeri, maka hanya perubahan kurs devisa pada saat ini dan di masa mendatang yang dapat mempengaruhi selisih balas jasa investasi. Sedangkan jika kurs rupiah menguat akan membuat disparitas balas jasa menurun antara investor luar negeri dengan dalam negeri. Dengan demikian membuat investor asing tidak tertarik lagi menanamkan modal di luar negeri dan lebih suka menanamkan modalnya di

negaranya, sebaliknya jika kurs melemah membuat disparitas balas jasa akan meningkat maka investor akan menanamkan modalnya di luar negeri. Dengan demikian terdapat hubungan yang negatif antara perubahan nilai tukar dengan investasi, karena apabila nilai tukar rupiah relatif tidak stabil maka akan membuat para investor dari luar negeri untuk tidak melakukan investasi di negara tersebut.

2. Jenis-jenis Nilai Tukar (Kurs)

Menurut Kewal (2012), ada empat jenis nilai tukar yang digunakan dalam transaksi maupun jual beli valuta asing, yaitu sebagai berikut:

- a. Selling rate (kurs jual), merupakan kurs yang ditetapkan oleh bank pada saat perdagangan valuta asing tertentu dan di waktu tertentu.
- b. Middle rate (kurs tengah), merupakan kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing atas mata uang nasional, yang ditentukan oleh Bank Central di saat tertentu.
- c. Buying rate (kurs beli), merupakan kurs yang ditetapkan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada waktu tertentu.
- d. Flat rate (kurs flat), merupakan kurs yang berlaku pada saat transaksi jual beli bank notes dan traveler cheque, dimana pada kurs ini telah dinilai promosi dan biaya lain-lain.

3. Sistem Nilai Tukar (Kurs)

Sifat dari kurs valuta asing bergantung pada sifat pasar. Jika di pasar secara bebas dapat melakukan transaksi jual beli valuta asing, maka kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Nopirin (2009) dalam Purnomo (2013), mengatakan bahwa ada beberapa sistem nilai tukar di Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Kurs Berubah-ubah

Dalam sistem ini semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi (relatif terhadap negara lain), maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan impor yang artinya permintaan akan valuta asing akan semakin besar. Kurs valuta asing cenderung naik (turunya harga mata uang sendiri). Dengan demikian inflasi akan mengakibatkan naiknya impor dan turunya ekspor yang dapat menyebabkan kurs valuta asing naik. Naiknya tingkat bunga dalam negeri dapat membawa modal masuk ke dalam negeri. Kurs valuta asing akan turun (nilai mata uang sendiri naik relatif terhadap valuta asing).

b. Sistem Kurs Stabil

Sistem kurs stabil bisa terjadi secara aktif dan pasif. Pemerintah menyiapkan dana untuk tujuan stabilitas kurs (*stabilization funds*) dalam sistem kurs stabil aktif. Kegiatan

stabilisasi kurs dilakukan dengan cara apabila terjadi penurunan tendensi kurs valuta asing maka valuta asing di pasar akan dibeli oleh pemerintah. Dengan bertambahnya tendensi pemerintah maka tendensi kurs yang turun dapat dicegah, dan sebaliknya apabila tendensi kurs naik maka valuta asing di pasar akan di jual oleh pemerintah sehingga penawaran akan valuta asing bertambah dan dapat mencegah naiknya kurs. Pada sistem kurs stabil pasif standar emaslah yang digunakan oleh pemerintah. Dalam standar emas, kurs valuta asing suatu negara dengan negara lain ditentukan dengan dasar emas.

c. Pengawasan devisa (*exchange control*)

Dalam sistem ini pemerintah menguasai seluruh transaksi valuta asing. Tujuannya yaitu agar keluarnya aliran modal dapat di cegah dan melindungi pengaruh depresi dari negara lain, terutama apabila negara tersebut menghadapi keterbatasan cadangan valuta asing dibanding dengan permintaannya.

F. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
----	-------------------	----------	-----------------	-------

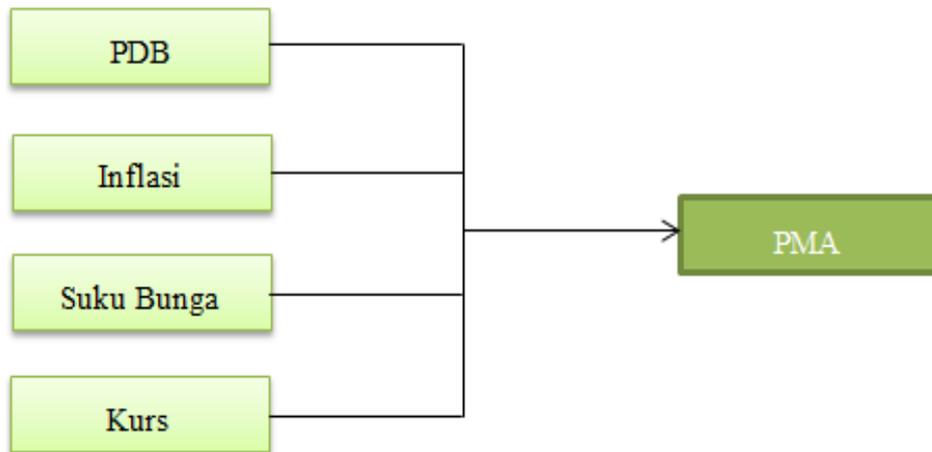
1	Nabilla Mardiana Pratiwi, Moch. Dzulkirom AR, dan Devi Farah Azizah, Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, Dan Nilai Tukar Terhadap Penanaman Modal Asing Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	Inflasi, suku bunga, nilai tukar, Investasi Asing, dan Pertumbuhan Ekonomi,	Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur	Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap PMA; Tingkat suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing; Nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan dan negative terhadap investasi asing, Inflasi dan nilai tukar berpengaruh signifikan dan negative terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga investasi asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	Rexsy S. Tambunan, Pengaruh Kurs, Inflasi, Libor Dan Pdb Terhadap Foreign Direct Investment (FDI) Di Indonesia	Kurs, Inflasi, Libor, Pdb dan Foreign Direct Investment (FDI)	Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan aplikasi SPSS 20	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Nilai Tukar, Inflasi, Libor dan PDB secara sekaligus / simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi Foreign Direct Investment (FDI). Uji individual / parsial menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto diperoleh yang memberikan kontribusi lebih besar daripada tingkat variabel Nilai Tukar, Inflasi, dan Libor atas realisasi Foreign Direct Investment (FDI).
3	Amida Tri Septifany, R. Rustam Hidayat dan Sri Sulasmiyati, Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar	Investasi Asing Langsung, Inflasi, Suku Bunga SBI, Nilai	Metode regresi linier berganda dengan data deret waktu dari Bank Indonesia	Hasil dari regresi ini yaitu variabel inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan cadangan devisa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia.

	Rupiah Dan Cadangan Devisa Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Studi kasus: Bank Indonesia Tahun 2006-2014)	Tukar, dan Cadangan Devisa		Tingkat suku bunga variabel SBI dan cadangan devisa berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia, kemudian variabel tingkat inflasi dan rupiah terhadap dollar mempunyai efek negatif dan berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia.
4	Putu Kartika Dewi dan Nyoman Triaryati, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga Dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung	Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Pajak, dan Investasi Asing Langsung (FDI)	Analisis Regresii Lineari Berganda	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap investasi asing langsung kemudian, suku bunga dan pajak berpengaruh signifikan dan negative terhadap investasi asing langsung
5	Muhammad Akmal Fadilah, Analisis Produk Domestik Bruto (Pdb), Suku Bunga Bi (Bi Rate), Dan Inflasi Terhadap Investasi Asing Langsung (Pma) Di Indonesia Periode 2006-2015	Investasi Asing, PDB, BI rate, dan Inflasi	Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS versi 20	Hasil penelitian yang diperoleh adalah PDB, BI rate, dan inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap investasi asing dengan tingkat signifikansi 5%. Secara parsial BI rate mempunyai pengaruh negatif terhadap investasi asing, sedangkan variabel GDP dan inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap investasi asing di Indonesia.

G. Kerangka Berfikir dan Hipotesis

1. Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian yang di ajukan oleh penulis yaitu:



Gambar 2.7
Kerangka Berfikir

2. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan diatas maka hipotesis yang dapat penulis buat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Diduga variabel Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.
- b. Diduga variabel inflasi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.
- c. Diduga variabel Tingkat Suku Bunga mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.
- d. Diduga variabel kurs rupiah mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.